GEMAH RIPAH LOH JINAWI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

2019

LKIP Kota Cirebon 2019

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Siliwangi No. 113 Tlp. (0231) 206011 - 206015 Fax. (0231) 206604
Email : Inspektorat.crb@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Cirebon, 31 Maret 2020

Inspektur Kota Cirebon,

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON INSPEKTORAT DAERAH

Drs. ASEP DEDI, M.Si
NIP. 19610105 198603 1 016

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon Tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon ini disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan ini, memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah Kota Cirebon yaitu: "**SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah"** sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023.

Upaya untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi tersebut tentulah tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras berbagai pihak serta bersama-sama menghadapi rintangan dan tantangan dengan meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintah Kota Cirebon yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Mudah-mudahan segala harapan tersebut mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT, Amin.

Cirebon, Maret 2020

WALIKOTA CIREBON,

DRS. H. NASHRUDIN AZIS, SH

Kata Pengantar I
Daftar Isi Ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar vii

BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Kota Cirebon 3
1.2.1 Kondisi Geografis Kota Cirebon 4
1.2.2 Kondisi Demografi Kota Cirebon 6
1.3 Struktur Organisasi 7
1.4 Isu Strategis 9

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 17
2.1 Perencanaan Strategis 17
2.2 Prioritas Pembangunan Daerah 33
2.3 Indikator Kinerja Utama 45
2.4 Perjanjian KInerja 48
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2019 50

BAB III Akuntabilitas Kinerja 53
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 55
3.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 60
3.2.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 61
3.2.2 Pengukuran, analisa, dan evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 67
3.3 Akuntabilitas Keuangan 190

BAB IV Penutup 195
LAMPIRAN
Perjanjiaan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon 2019
Daftar Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran 2019
Daftar Inovasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Daftar Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Tabel 1.1 Luas Wilayah Perkecamatan …….. 6

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Cirebon Menurut Umur …….. 7

Tabel 1.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu-isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018-2023…… 15

Tabel 2.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 …….. 29

Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023 …….. 36

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon ……... 45

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019……. 48

Tabel 2.5 Rencana Belanja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 …… 50

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis …….. 50

Tabel 3.1 Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasarkan Kode Warna …….. 54

Tabel 3.2 Tabel Predikat Capaian Kinerja ……..…… 54

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon …… 55

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 ……..……..…… 61

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 ……..…… 64

Tabel 3.6 Jumlah Sasaran Pada Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Capaian …. 66

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tujuan Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon Tahun 2019 …… 68

Tabel 3.8 Capaian Sasaran Meningkatan akses dan mutu pendidikan Tahun 2019 ….. 73

Tabel 3.9 Capaian Sasaran Meningkatnya Minat baca Masyarakat Tahun 2019 …… 76

Tabel 3.10 Capaian Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon Tahun 2019 ……..……..…… 78

Tabel 3.11 Capaian Sasaran Terkendalinya jumlah penduduk Tahun 2019 …….. 83

Tabel 3.12 Capaian Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Tahun 2019 ……... 84

Tabel 3.13 Capaian Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda Tahun 2019 88

Tabel 3.14 Daftar Atlet Berprestasi 88

Tabel 3.15 Daftar Organisasi Pemuda Kota Cirebon 89

Tabel 3.16 Capaian Sasaran Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak Tahun 2019 93

Tabel 3.17 Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon Tahun 2019 97

Tabel 3.18 Capaian Sasaran Berkurangnya Penduduk Miskin Tahun 2019 100

Tabel 3.19 Capaian Sasaran Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan Tahun 2019 103

Tabel 3.20 Capaian Sasaran Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan Tahun 2019 106

Tabel 3.21 Capaian Sasaran Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan Tahun 2019 107

Tabel 3.22 Capaian Sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal Tahun 2019 111

Tabel 3.23 Data Objek Pemajuan Kebudayaan 112

Tabel 3.24 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ KelurahanTahun 2019 114

Tabel 3.25 Capaian Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi dalam Manajemen Pemerintah.... 119

Tabel 3.26 Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur Tahun 2019 121

Tabel 3.27 Capaian Sasaran Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Tahun 2019 126

Tabel 3.28 Capaian Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019 129

Tabel 3.29 Nilai Laporan Hasil Evaluasi Atas Implemantasi Sistam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 130

Tabel 3.30 Capaian Sasaran Meningkatnya Maturitas SPIP Tahun 2019 133

Tabel 3.31 Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Tahun 2019 135

Tabel 3.32 Hasil Survey Kepuasan Atas Layanan Perizinan dan Penanaman Modal 136

Tabel 3.33 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat “Pelayanan Kependudukan 138

Tabel 3.34 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 141

.

Tabel 3.35 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Tahun 2019 ……..…… 142

Tabel 3.36 Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD Tahun 2019 ….. 147

Tabel 3.37 Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profresional, Handal dan Terintegrasi dalam Menunjang Smart City Tahun 2019 …… 150

Tabel 3.38 Capaian Sasaran Meningkatkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019Tahun 2019 …… 153

Tabel 3.39 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019 ……. 156

Tabel 3.40 Capaian Tujuan Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Tahun 2019 ……. 158

Tabel 3.41 Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan Tahun 2019 … 160

Tabel 3.42 Capaian Sasaran Meningkatya Kapasitas Pelayanan Drainase Tahun 2019 166

Tabel 3.43 Capaian Sasaran Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat Tahun 2019 ……..…….. 170

Tabel 3.44 Analisis Tim PKL Kota Cirebon Tentang Proporsi Pemilihan Moda Transportasi ……..……..…….. 172

Tabel 3.45 Capaian Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim ……..……..……. 174

Tabel 3.46 Luas Wilayah Tutupan Lahan Di Kota Cirebon …… 177

Tabel 3.47 Sasaran Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan Kota Cirebon ……..…… 179

Tabel 3.48 Sasaran Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat Tahun 2019 ……..……..…….. 182

Tabel 3.49 Sasaran Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional Tahun 2019 ……..……..…… 184

Tabel 3.50 Sasaran Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Tahun 2019 ……..……..…….. 186

Tabel 3.51 Data Realisasi APBD Tahun 2019 ……..…….. 190

Tabel 3.52 Data Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ……. 190

Gambar 1.1 Peta Kota Cirebon …….. 5
Gambar 3.1 Diagram realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama …….. 59
Gambar 3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon, 2011-2019 …….... 70
Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Gini Rastio 2015-2018 …… 71
Gambar 3.4 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama aekolah …… 74
Gambar 3.5 Usia Harapan Hidup Saat Lahir ……... 79
Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Gender Kota Cirebon …… 95
Gambar 3.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2010-2019 …… 101
Gambar 3.8 Persentase Keaktifan Objek Pemajuan Kebudayaan ……..... 112
Gambar 3.9 Grafik Hasil Perhitungan IKM Kependudukan dan Pencatatan Sipil…… 139

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan gambaran akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada publik berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Kinerja Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki peran strategis dalam mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja. Di era transparansi dan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah mekanisme pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pemerintah daerah mendapatkan ruang kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Dalam bingkai sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Kota Cirebon mendapatkan delegasi untuk menyelenggarakan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan

Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Statistik, Bidang Persandian, Bidang Kebudayaan, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Pembagian Urusan Bidang kelautan dan Perikanan, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dan internal sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat. Berbekal berbagai target kinerja sebagaimana telah diformulasikan dalam indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon bertekad untuk menyampaikan informasi capaian Daerah kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada masyarakat pada umumnya dan warga Kota Cirebon pada khususnya secara baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Tahun 2019 ini memberikan gambaran dan menjelaskan secara utuh dan komprehensif pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2019 sekaligus juga menggambarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pencapaian visi dan misi yang sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023, sehingga dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dideskripsikan apa saja yang sudah dilakukan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan di Kota Cirebon pada tahun 2019 ini..

1.2 Gambaran Umum Kota Cirebon

1.2.1 Kondisi Geografis Kota Cirebon

Kota Cirebon terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi 6,41^{o} Lintang Selatan dan 108,33^{o} Bujur Timur pada Pantai Utara Pulau Jawa Bagian Barat. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter.

Secara administrasi Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 22 (dua puluh dua) kelurahan, 248 Rukun Warga, dan 1.369 Rukun Tetangga dengan luas wilayah

administratif sekitar 37,358 km^2 atau sekitar 3.736 hektar dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Sungai Kedung Pane
Sebelah Barat	:	Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon
Sebelah Selatan	:	Sungai Kalijaga
Sebelah Timur	:	Laut Jawa

Dilihat dari wilayah administratif pemerintahan, Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan, yaitu:

1) Kecamatan Kejaksan terdiri dari Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Kesenden, Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Kebon Baru;
2) Kecamatan Kesambi terdiri dari Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya dan Kelurahan Drajat;
3) Kecamatan Pekalipan terdiri dari Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pekalipan, dan Kelurahan Pekalangan;
4) Kecamatan Lemahwungkuk terdiri dari Kelurahan Kesepuhan, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Panjunan, dan Kelurahan Lemawungkuk;
5) Kecamatan Harjamukti terdiri dari Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kecapi, Kelurahan Larangan, Kelurahan Argasunya, dan Kelurahan Kalijaga.

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi yang berada di wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri, karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa lokasi. Karenanya di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan yang masih baik yaitu memiliki indikator lingkungan di bawah ambang batas, dan kawasan yang kondisi lingkungannya telah berada di atas ambang batas kualitas lingkungan yang diperkenankan. Kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan di bawah ambang batas tersebar di seluruh wilayah kota khususnya di bagian selatan , ditandai dengan masih adanya kawasan ruang terbuka hijau. Namun yang harus menjadi perhatian adalah kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya telah terjadi penurunan kualitas. Peta wilayah Kota Cirebon disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Peta Kota Cirebon

Sumber :Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Tabel 1.1
Luas Wilayah per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Harjamukti	17.615	5	76	454
2.	Lemahwungkuk	6.507	4	42	232
3.	Pekalipan	1.561	4	39	186
4.	Kesambi	8.059	5	55	307
5.	Kejaksan	3.616	4	35	183
Jumlah		37.358	22	248	1.369

Sumber : Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2018, diolah

Jika dilihat pada tabel diatas, dari 5 kecamatan, 22 kelurahan, 248 RW dan 1.369 RT, Kecamatan Harjamukti merupakan wilayah kecamatan yang paling luas dan kecamatan Pekalipan merupakan wilayah dengan luas paling kecil.

Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, Kota Cirebon termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi dengan suhu udara minimum rata–rata tahun 2017 sebesar 24,13° C dan maksimum rata-rata 31,18º C serta banyaknya curah hujan 2.323,1 mm per tahun dengan hari hujan 87 hari, atau rata-rata 7,25 hari per bulan.

1.2.2 Demografi Kota Cirebon

Penduduk (sumber daya manusia) merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya *(input)* produksi sekaligus menciptakan *demand* dan pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi. Namun demikian, jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan (pengangguran,

kemiskinan, dan lain- lain) serta perlu ditingkatkan kualitasnya terutama menyongsong era Indonesia Emas tahun 2045.

Jumlah penduduk Kota Cirebon dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari sisi kuantitas. Pada tahun 2019, penduduk Kota Cirebon berjumlah 340.370 jiwa, bertambah 38.650 jiwa dibandingkan dengan tahun 2013 (301.720 jiwa). Jumlah penduduk laki-laki hampir sebanding dengan penduduk perempuan, yaitu 50,14 persen laki-laki dan 49,86 persen perempuan. Berdasarkan luas wilayah dibandingkan populasi penduduk, kepadatan penduduk Kota Cirebon rata-rata sekitar 8.387 orang per/km2. Hasil proyeksi penduduk menurut kelompok umur bahwa penduduk paling banyak terdapat di kelompok umur 20-24 tahun yaitu 28.416 jiwa sementara paling sedikit ada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu 5235 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur 2019

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
00-04	13.966	12.958	26.924
05-09	15.342	14.321	29.663
10-14	15.423	14.503	29.926
15-19	13.723	12.905	26.628
20-24	14.502	13.914	28.416
25-29	13.779	13.264	27.043
30-34	12.973	12.441	25.414
35-39	14.054	13.889	27.943
40-44	13.062	13.218	26.280
45-49	11.316	11.480	22.796
50-54	9.728	10.407	20.135
55-59	7.350	8.424	15.774
60-64	6.100	7.033	13.133
65-69	4.545	4.829	9.374
70-74	2.332	2.903	5.235
>=75	2.389	3.297	5.686
JUMLAH	170.584	169.786	340.370

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SIpil, diolah

Komposisi penduduk Kota Cirebon yang menunjukan Bonus Demografi merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan Kota Cirebon, sepatutnya skema perencanaan pembangunan mempertimbangkan aspek bonus demografi ini untuk menjamin strategi dan arah kebijakan yang tepat.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon membentuk organisasi perangkat daerah dengan komposisi sebagai berikut

a. Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
b. Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
c. Inspektorat Kota Cirebon;
d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
h. Satuan Polisi Pamong Praja;
i. Dinas Pemadam Kebakaran;
j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Tenaga Kerja;
l. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
m. Dinas Lingkungan Hidup;
n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
p. Dinas Perhubungan;
q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
r. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
v. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
w. Badan Keuangan Daerah;
x. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
y. Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
z. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
aa. Kecamatan sebanyak 5 Kecamatan. :
    1. Kecamatan Kejaksan
    2. Kecamatan Kesambi
    3. Kecamatan Harjamukti
    4. Kecamatan Lemah Wungkuk
    5. Kecamatan Pekalipan

1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi.

Isu strategis pembangunan Kota Cirebon dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah juga memperhatikan hasil evaluasi dari laporan kinerja pada tahun N-1. Tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan, yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan peningkatan daya saing daerah. Isu-isu strategis tersebut merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan isu-isu strategis disusun berdasarkan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman lingkungan eksternal sesuai dengan dinamika internasional, nasional dan lokal Kota Cirebon. Isu strategis pembangunan Kota Cirebon 5 (lima) tahun ke depan diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) permasalahan pembangunan Kota Cirebon; (2) dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Cirebon; (3) kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Cirebon; (4) kebijakan pembangunan

Kota Cirebon yang meliputi RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 dan RTRW Kota Cirebon 2011-2031; dan (5) Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, maka ditetapkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Cirebon 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
2. Kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Peningkatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Produktivitas daya saing ekonomi secara berkelanjutan.
5. Pemajuan kebudayaan dan pariwisata berbasis budaya dan sejarah.
6. Reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
7. Kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.

Secara umum isu strategis tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Kota Cirebon sebagai salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota di Jawa Barat dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 313.325 jiwa. Berdasarkan proyeksi perkembangan penduduk yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Cirebon akan mencapai 335.661 jiwa. Jumlah penduduk tersebut kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beban pembangunan. Oleh karena itu perlu dipacu dan didorong dengan berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif, sehingga memiliki keunggulan, handal, berkarakter, dan memiliki daya saing global. Saat ini dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Kota Cirebon masih dihadapkan pada berbagai hambatan, diantaranya masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang baru mencapai 57,94 persen, APM SMP/MTs sebesar 83,12 persen dan APM SMA/SMK/MA sebesar 55,70 persen. Begitu pula Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cirebon yang pada tahun 2017 baru mencapai 9,96 tahun, yang artinya tingkat penduduk penduduk Kota Cirebon pada tahun 2017 rata-rata baru mencapai kelas I SMA. Selain peningkatan akses

pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat usia sekolah *(education for all)* yang harus ditingkatkan adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik, dimana pada saat ini guru SD/MI yang bersertifikasi tenaga pendidik baru mencapai 48,24 persen dan guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikasi tenaga pendidik baru mencapai 53,41 persen.

Selain hal tersebut, masalah tata kelola Pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari masih banyaknya sekolah baik di tingkat SD maupun SMP yang masih terakreditasi C. Jumlah SD yang terakreditasi C pada tahun 2017 sebanyak 114 sekolah dari 170 sekolah atau 67,06 persen, sedangkan SMP dengan akreditasi C sebanyak 30 sekolah dari 44 sekolah yang ada atau 68,18 persen. Dari uraian tersebut, maka kualitas/mutu, relevansi dan tata kelola Pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan untuk lebih meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan juga saat ini belum optimal yang ditandai dengan capaian indeks kesehatan pada tahun 2017 sebesar 79,83 poin dan masih perlu ditingkatkan. Masih adanya kematian bayi (17 kasus), kematian ibu melahirkan, dan berat bayi lahir rendah (168 kasus), kematian anak balita (6 kasus), cakupan pemberian ASI ekslusif (64,26 persen) juga perlau mendapat perhatian. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan, serta perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.

2. Isu Kemiskinan, Pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Upaya-upaya penanganan kemiskinan telah dilakukan dari tahun ke tahun, jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 31,9 ribu jiwa dan pada tahun 2017 turun menjadi 30,19 ribu jiwa atau turun dari 10,54 persen menjadi 9,66 persen, sehingga dalam periode 2013-2017 pemerintah Kota Cirebon berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.710 jiwa atau 0,88 persen atau rata-rata per tahun turun sebesar 0,18 persen. Penurunan jumlah tersebut tergolong lambat, sehingga

memerlukan akselerasi melalui intervensi berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran, tepat metode dan cepat dalam penanganannya.

Disamping itu, keberadaan penyandang masalah kesejahteraan social yang dirasakan semakin komplek memerlukan intervensi yang tepat. PMKS di Kota Cirebon tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga berasal dari luar kota daerah sekitar bahkan ada yang berasal dari provinsi tetangga, sehingga dalam penanganannya memerlukan koordinasi dan kerja sama lintas wilayah.

3. Isu Peningkatan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

Pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah Kota Cirebon, karena hal ini terkait erat dengan tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri terhadap pembangunan kotanya. Kesenjangan antar wilayah yang cenderung semakin melebar akan menimbulkan gejolak pembangunan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari nilai indeks gini Kota Cirebon yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,38 menjadi 0,41 pada tahun 2018, yang artinya kesenjangan pendapatan antar masyarakat semakin melebar. Disamping itu, pelambatan pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor lambatnya pemerataan hasil-hasil pembangunan di semua aspek kehidupan. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mencapai 5,71 persen dan tahun 2018 sebesar 5,79 persen, sehingga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, perekonomian Kota Cirebon hanya tumbuh 0,08 persen.

Prinsip pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan oksigen (O_2) juga akan meningkat, begitu pula ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian untuk pemenuhannya.

Perkembangan Kota Cirebon tidak terlepas dari pertambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke wilayah perkotaan, menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Hal tersebut bertambah sulit

karena keterbatasan lahan untuk Tempat pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pengangkutan sampah ke TPA juga terkendala karena jumlah kendaraan yang kurang mencukupi dan kondisi peralatan yang telah tua. Masalah lainya adalah pengelolaan TPA yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan.

4. Isu Produktivitas Daya Saing Ekonomi Secara Berkelanjutan.

Daya saing ekonomi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Daya saing daerah merupakan salah satu tinjauan tingkat keberhasilan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Daya saing ekonomi daerah dapat dilihat dari (1) tingkat produktifitas angkatan kerja yang bekerja baik pada sektor formal maupun informal; (2) kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen kapasitas keuangan daerah yang dipengaruhi oleh kinerja perekonomian kota; (3) kinerja BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD; (4) angka kejadian kriminalitas; (5) ketergantungan penduduk, yang menunjukan rasio antara penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk produktif; (6) iklim investasi.

Kinerja daya saing daerah memiliki kaitan dengan kinerja kesejahtaraan masyarakat, dan pelayanan umum. Daya saing daerah dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat seperti daya beli dan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya daya saing daerah memberi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat berupa iklim investasi yang diperlukan untuk menggerakan ekonomi kota.

Indikator daya saing daerah lainya yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon adalah daya beli masyarakat. Data Tahun 2016 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Cirebon berada ada kisaran Rp. 10.916 ribu

5. Isu Pemajuan Kebudayaan dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum

optimalnya pengembangan SDM Pariwisata serta belum optimalnya pengembangan manajemen pariwisata dan aset pariwisata. Pada bidang kebudayaan terjadi beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunya penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Cirebon, hal tersebut disebabkan belum optimalnya pelestarian Nilai Budaya Cirebon yang memiliki kekayaan warisan budaya keraton, belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai Aset Pariwisata Kota Cirebon, dan belum optimalnya pengembangan ragam Seni Tradisional Cirebon. Sebagai akibat kurangnya pengelolaan kekayaan dan keragaman seni dan budaya tersebut, nampak beberapa kesenian tradisional Cirebon yang hamper punah, seperti Seni Pertunjukan Tarling.

6. Isu Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik.

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain, misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.

Dalam menjalankan pemerintahan, dikenal konsep *good governance* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Untuk dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu perbaikan mendasar dari berbagai lini mulai dari rekrutmen hingga pengawasan. Oleh karena itu, ketika sebuah daerah ingin menyelenggarakan pemerintahan dengan tata kelola yang baik, perlu analisis menyeluruh di berbagai lini agar perbaikan yang dilakukan dapat optimal. Kasus-kasus yang saat ini terjadi di Kota Cirebon membuat perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dan perlu perhatian khusus. Selain tindakan penanggulangan seperti monitoring dan pengawasan, perlu juga tindakan pencegahan seperti pembentukan karakter dan integritas aparatur. Selain kualitas aparatur, perlu juga peninjauan terhadap birokrasi yang saat ini berjalan. Melalui peninjauan yang dilakukan, diharapkan dapat dilakukan

perbaikan sehingga akan mendukung tata kelola pemerintah yang lebih professional, akuntabel, bersih dan berwibawa.

7. Isu Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk lebih meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang inklusif diperlukan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Tingkat kondusifitas masyarakat juga menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di Kota Cirebon.. Oleh karena itu, penegakan peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan untuk menciptakan kondusifitas dan kenyamanan dalam beraktivitas. Upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah akan terwujud jika kemanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, keterkaitan antara permasalahan pokok pembangunan dengan isu-isu stragtegis pembangunan beserta prioritas pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu-isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018-2023

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.	Isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia.
2.	Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Isu Kemiskinan, Pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.	Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan
3.	Belum optimalnya	Isu Peningkatan	

	pelayanan infrastruktur perkotaan.	Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
4.	Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mengalami pelambatan	Isu Produktivitas Daya Saing Ekonomi Secara Berkelanjutan	Peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi
5.	Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah.	Isu Pemajuan Kebudayaan dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah.	Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi pariwisata
6.	Belum optimalnya kinerja penyelenggara-an pemerintahan daerah dan pelayanan publik; dan	Isu Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
7.	Meningkatnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Isu Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum

Sumber: Dokumen RPJMD 2018-2023